Kota Pasuruan

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2021-2026



INTERNALISASI RPJMD KOTA PASURUAN

TAHUN 2021 – 2026 KEPADA SELURUH KEPALA PD DILINGKUNGAN PEMKOT PASURUAN

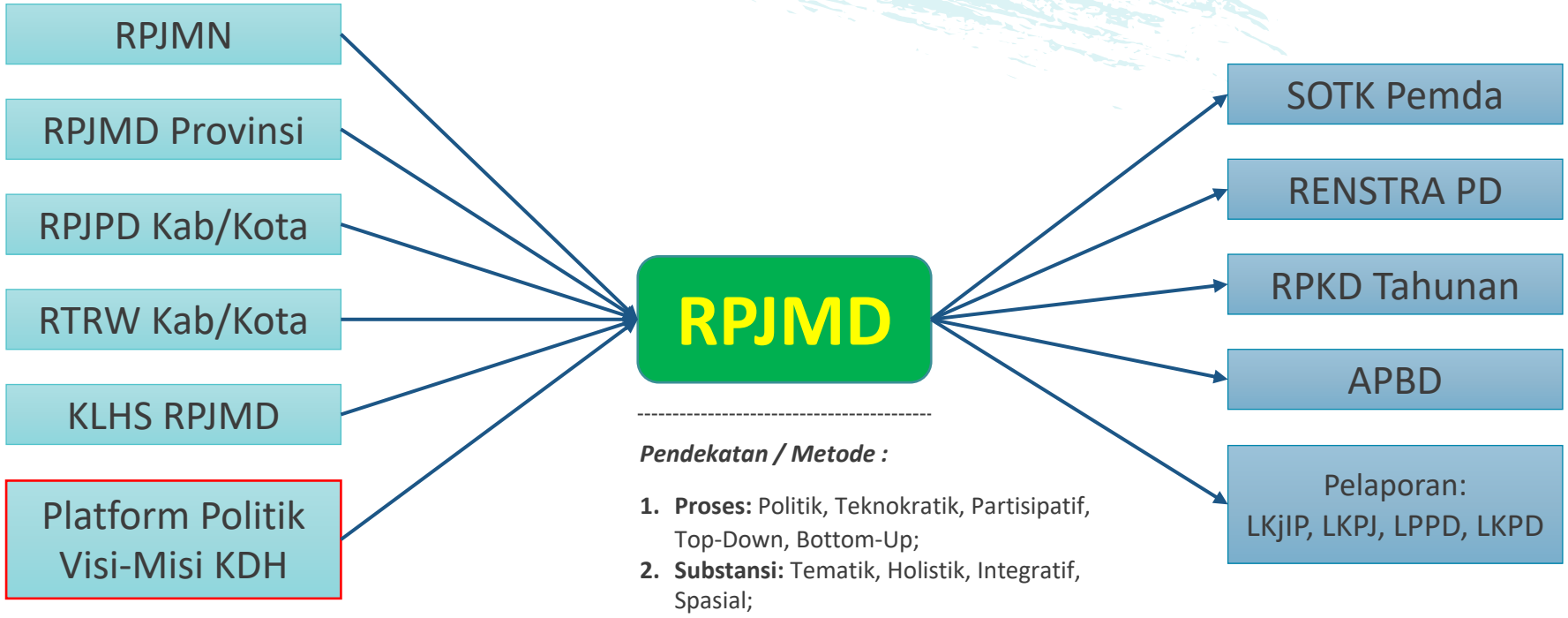
Andy Kurniawan

POSISI STRATEGIS RPJMD

RPJMD Kota Pasuruan terhadap Pembangunan Kota Pasuruan

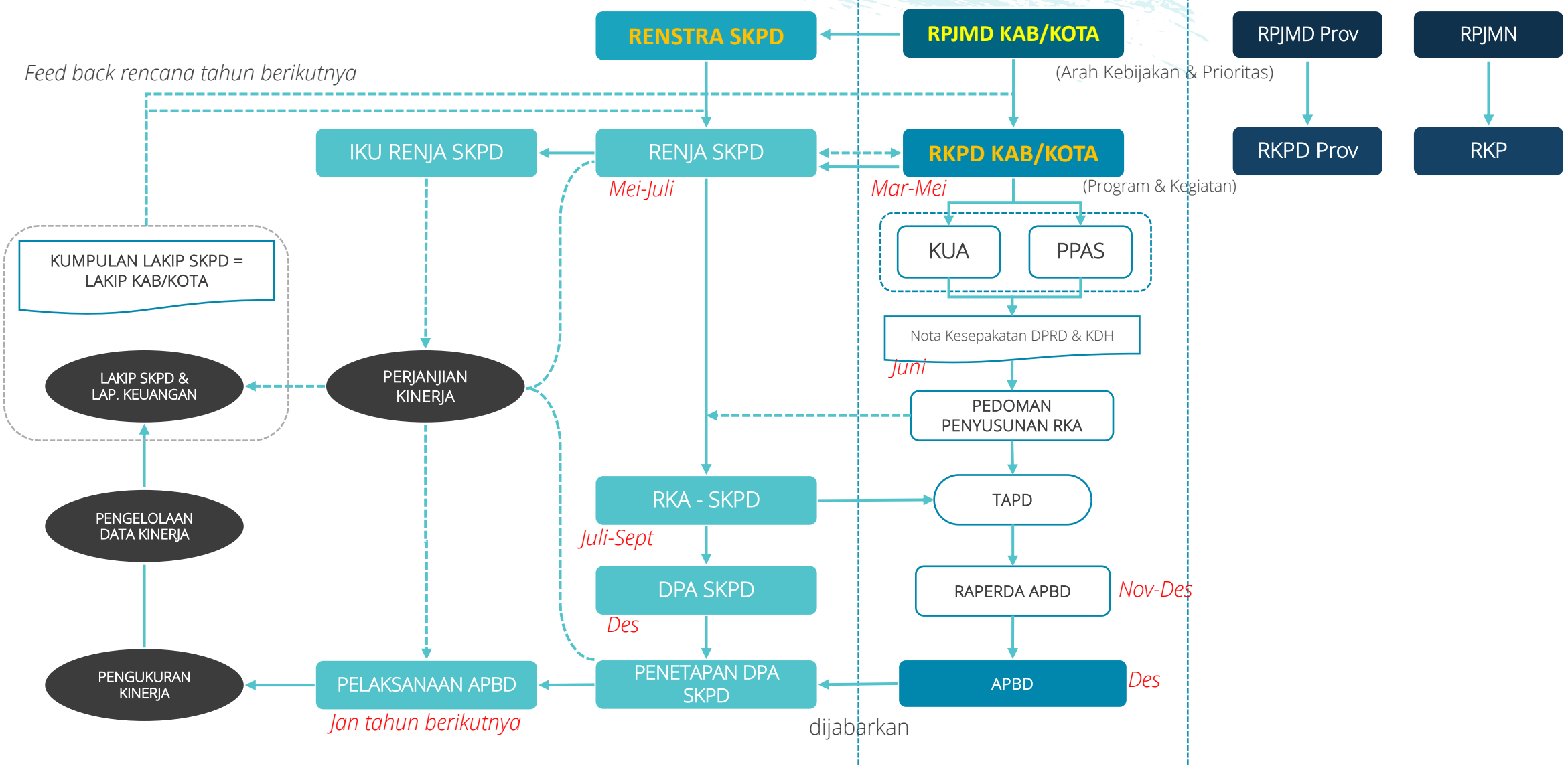
RPJMD

(dipengaruhi & mempengaruhi)



- ✓ **RPJMD** adalah dokumen NORMATIF dan POLITIK;
- ✓ **RPJMD** memuat 60% Kebijakan (makro) dan 40% Teknis (mikro);
- ✓ **RPJMD** menjadi manivestasi politik Kepala Daerah dan penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan;
- ✓ Menyusun **RPJMD** diorientasikan untuk memudahkan Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah 5 tahun kedepan untuk diimplementasikan dengan mudah dan jelas;

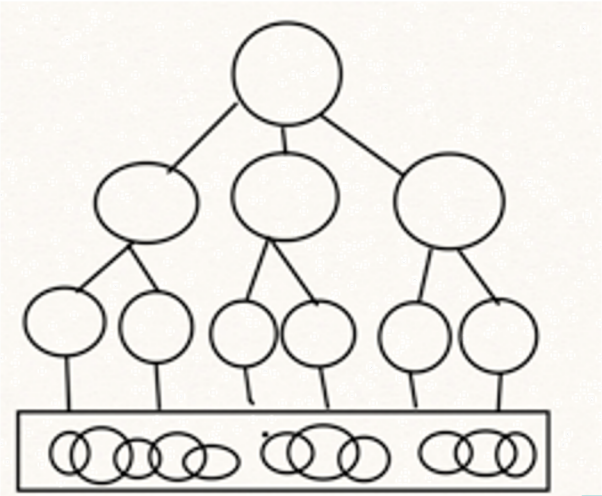
RPJMD DALAM KERANGKA MANAJAMEN KINERJA PEMERINTAH DAERAH



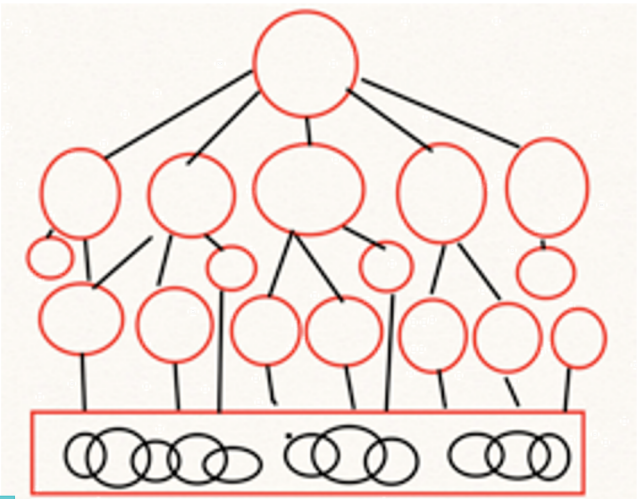
MANDAT RPJMD

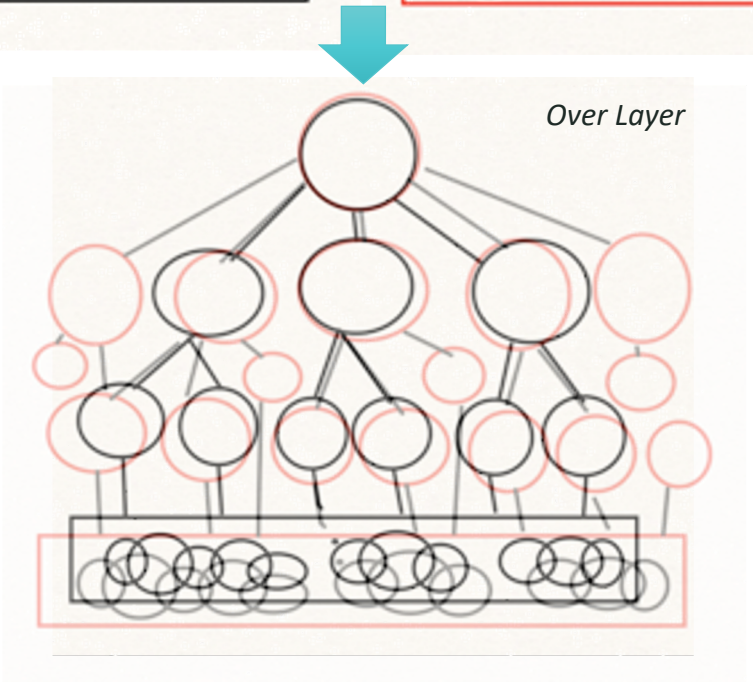
Bagaimana OPD membaca, memahami dan mengimplementasikan RPJMD

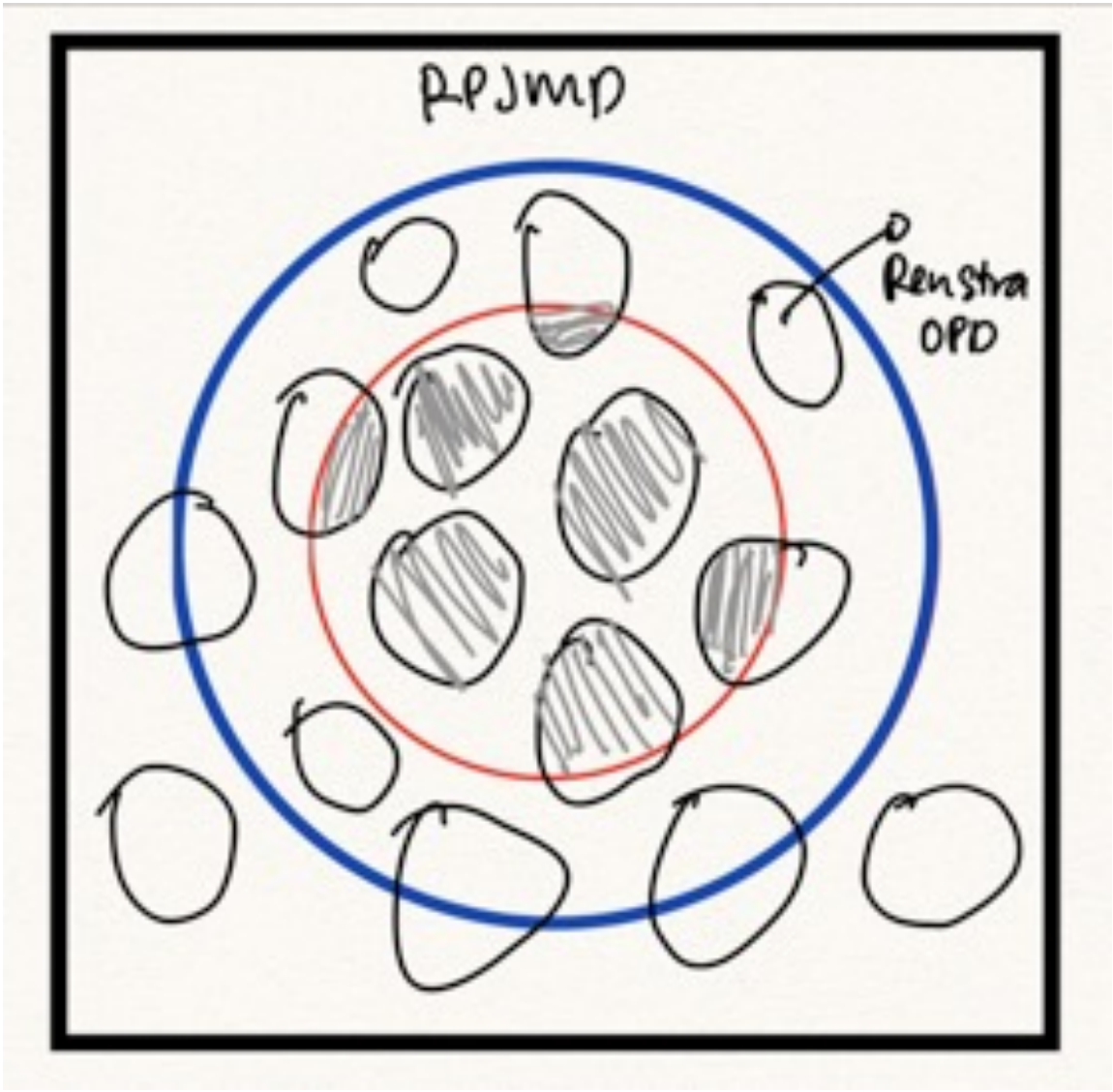
Model Peta Strategis
Perencanaan Pembangunan



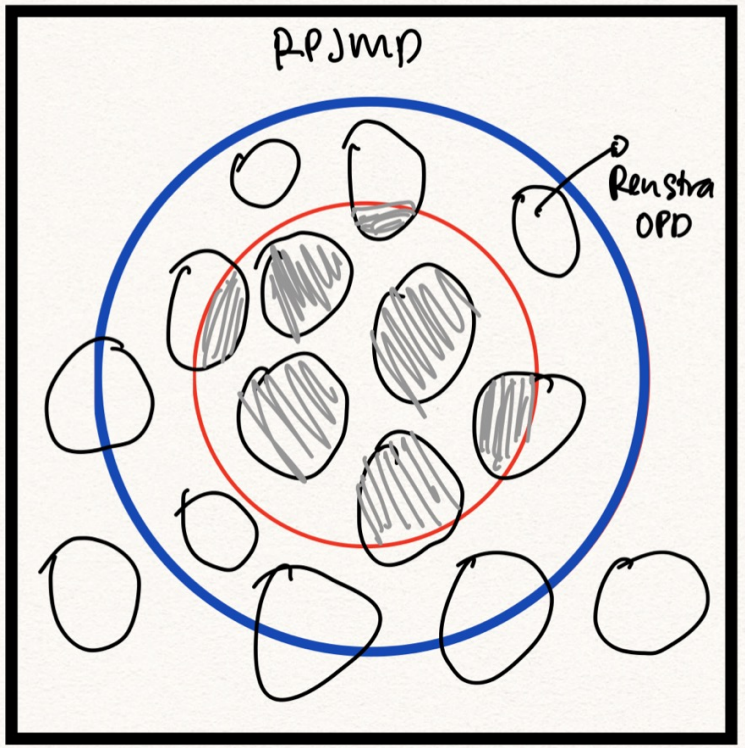
Model Peta Strategis
Kelembagaan Perangkat Daerah

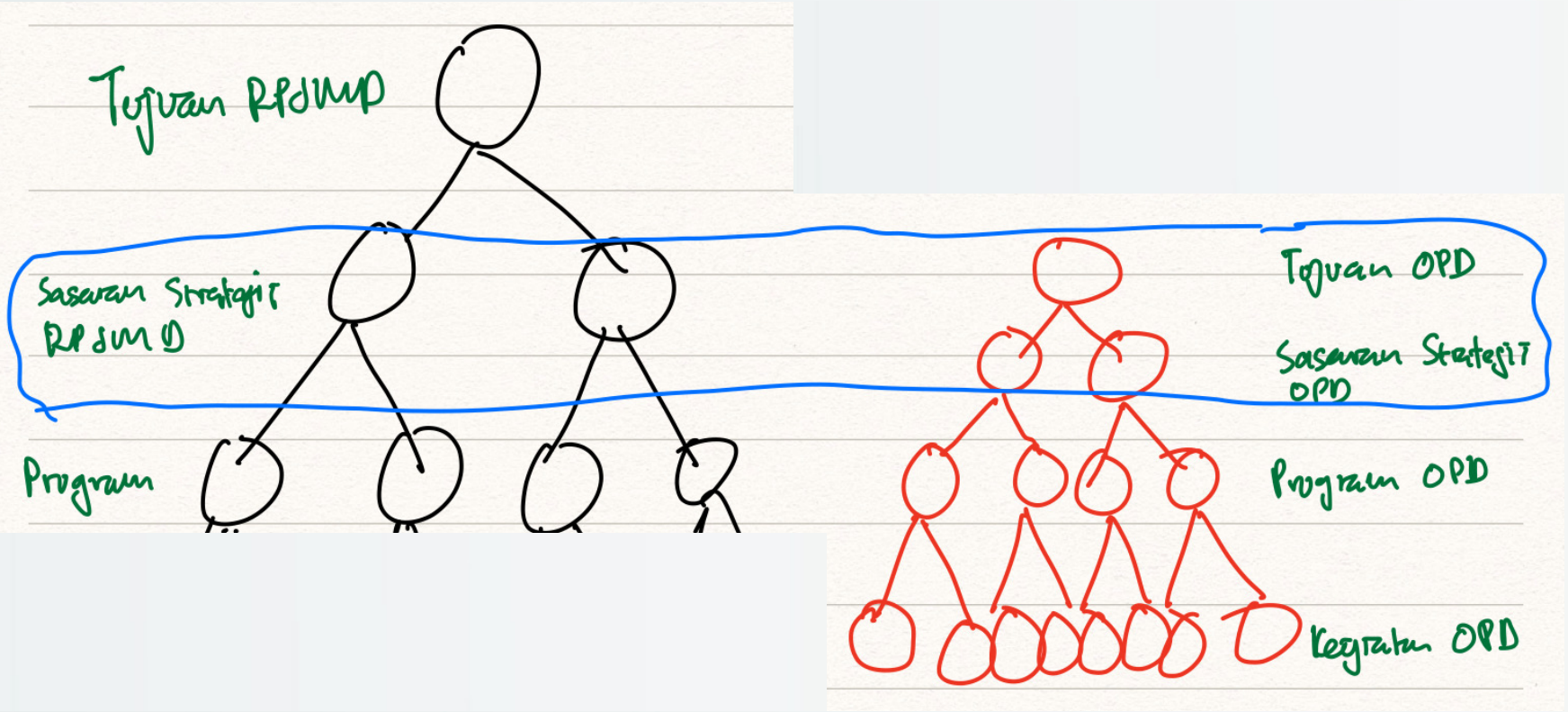




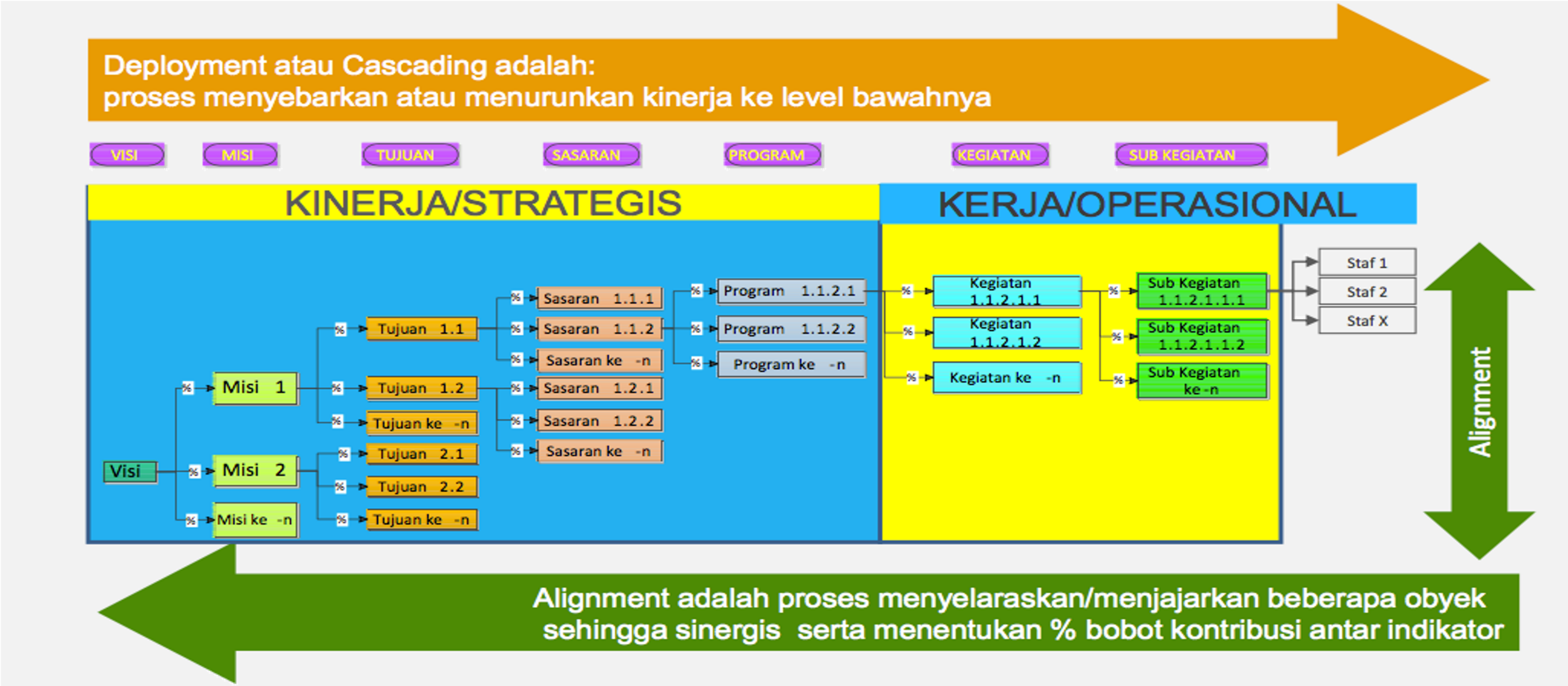


HUBUNGAN RPJMD DENGAN RENSTRA PD





Cascading dan Alignment Kinerja





Pasuruan Kota Madinah

MAJU EKONOMINYA

Ekonomi tumbuh dan merata, kesenjangan menyempit, kemiskinan berkurang, pengangguran menurun, Sektor Industri dan UMKM bertumbuh, PAD meningkat

INDAH KOTANYA

Infrastruktur berkualitas, lingkungan yang ramah, dan resiko bencana berkurang.

HARMONIS WARGANYA

Kesalehan Sosial meningkat, Akses Pendidikan dan Kesehatan terjamin, masyarakat puas terhadap layanan, guyup-rukun berdampingan, keberpihakan kepada perempuan, anak, difable dan lansia, perlindungan sosial terpenuhi.



LOGFRAME
logical framework
PENCAPAIAN VISI-MISI

Visi :

PASURUAN KOTA MADINAH
"MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA"

Misi :

1	2	3	4
KEMANDIRIAN EKONOMI	**INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN**	**SOSIAL MASYARAKAT**	**TATAKELOLA PEMERINTAHAN**
Tujuan : **KEMANDIRIAN EKONOMI** ***(Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio):***	**INFRASTRUKTUR STRATEGIS BERKELANJUTAN** ***(IKLI, IKLH):***	**LAYANAN DASAR DAN SOSIAL** ***(IPM, Indeks Kesalehan Sosial):***	**BIROKRASI YANG DINAMIS** ***(Indeks Reformasi Birokrasi (RB):***
Sasaran: 1. Ketahanan Ekonomi Masyarakat *(PDRB per Kapita);* 2. Sektor Unggulan Tumbuh *(PDRB Sektor Unggulan);* 3. Mengurangi Kemiskinan *(Angka Kemiskinan);* 4. Menurunkan Pengangguran *(TPT);* 5. Pendapatan Daerah Meningkat *(Rasio PAD);* 6. Daya Saing Pariwisata *(Tourism Intensity Index)*	1. Layanan Infrastruktur Dasar *(Sanitasi, Air Bersih);* 2. Layanan Infrastruktur Perhubungan *(Jalan, Jembatan)* 3. Ruang Terbuka Hijau *(ITL);* 4. Zero Karbon *(IKU);* 5. Kualitas Air *(IKA);* 6. Mengurangi Resiko Bencana *(IRBi);*	1. Kualitas Pendidikan *(indeks pendidikan);* 2. Kualitas Kesehatan *(indeks kesehatan);* 3. Daya Beli Masyarakat *(PPP);* 4. Toleransi Keberagaman *(indeks toleransi);* 5. Budaya Gotong Royong *(indeks solidaritas);* 6. Keamanan Lingkungan *(indeks stabilitas);* 7. Keberpihakan Perempuan *(IPG);*	1. Kepatuhan Laporan Keuangan *(WTP);* 2. Pemerintahan Berbasis Digital *(indeks SPBE);* 3. Kepuasan Masyarakat *(IKM);* 4. ASN yang Profesional *(Indeks Profesionalitas Aparatur);* 5. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah *(Sakip);* 6. Rasa Aman Penyelengara Pemerintahan *(Maturitas APIP);*
Program Prioritas KDH: 1. **BALAPAN** (Membuka Lapangan Pekerjaan); 2. **MOTIF** (UMKM dan Ekonomi Kreatif); 3. **KEMBANG GIRI** (Wisata Bahari dan Religi)	1. **TUTUR RAMAH** (Infrastruktur yang Ramah Lingkungan);	1. **TUMPUAN** (Bantuan Modal Usaha Perempuan Kepala Keluarga); 2. **DIKTIAS BERPARAS ASIH** (Pendidikan dan Kesehatan) 3. **MAS TRI** (Masif Penanganan Covid-19);	1. **SMART GO** (Digitalisasi Layanan dan Smart Governance); 2. **DAHAN PADI** (Pelayanan Perizinan Sehari Mesti Jadi)
OPD Pelaksana: *DPMPPTSP, Dinkop UM, Disperindag, Disparpora, Dispendikbud, Bapenda, BPKAD, Disnaker, Dinas Sosial*	*Dishub, DLH, Disperkim, DPUPR*	*Dispendikbud, Dinkes, Dinas Perpustakaan Arsip, DP3AKB, Disperindag, Dispertanian dan Ketahanan Pangan, Kesbangpol, Satpol PP, Dinsos*	*Setda, Bapenda, BPKAD, BKD, Kecamatan, Diskominfo, DPMPPTSP*



MISI I

MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL UNTUK MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN PENGURANGAN KEMISKINAN



1 MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL UNTUK MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN PENGURANGAN KEMISKINAN

Tujuan dan Indikator Tujuan (IKU)	**Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal**	
	Gini Rasio (*Baseline 2020 : 0,38; Target 2024: 0,37; Target 2026: 0,36*)	**Pertumbuhan Ekonomi** (*Baseline 2020 : -4,33; Target 2024: 5,74; Target 2026: 5,81*)
Sasaran dan Indikator Sasaran (IKD)	**Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi**	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah**
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka Kemiskinan	PDRB Perkapita	Rasio PAD terhadap Pendapatan
Baseline	2020 : **6,33**	2020 : **6,66**	2020 : **38,108**	2020 : 18%
Target KDH	2024 : **4,19**	2024 : **5,37**	2024 : **46,360.6**	2024 : 20%
Target RPJMD	2026 : **3,91**	2026 : **4,8**	2026 : **49,990.50**	2026 : 22%
Urusan	1. Urusan Pemuda dan Olahraga 2. Urusan Ketenagakerjaan	1. Urusan Sosial	1. Urusan Penanaman Modal 2. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro 3. Urusan Pariwisata (Ekraft) 4. Urusan Penunjang Pemerintahan 5. Urusan Perdagangan 6. Urusan Perindustrian 7. Urusan Pertanian 8. Urusan Perikanan	1. Urusan Keuangan Daerah 2. Urusan Pariwisata 3. Urusan Kebudayaan
PERANGKAT DAERAH	1. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 2. Dinas Tenaga Kerja	1. Dinas Sosial	1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 3. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 4. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 5. Setda Bag. Administrasi Perekonomian Dan SDA 6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 7. Dinas Perikanan	1. Badan Pendapatan Daerah 2. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

SASARAN	MENINGKATNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN EKONOMI		MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	
INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	ANGKA KEMISKINAN	PDRB PERKAPITA	RASIO PAD TERHADAP PENDAPATAN
PROGRAM PRIORITAS KDH	1. Bantuan Permodalan berbasis ide Bisnis 2. Creative-Hub pusat kota, DAN 1 Kelurahan & Kecamatan 1 Co-working Space, 3. BALAPAN (Pembukaan Lapangan Pekerjaan) 4. Digitalisasi bursa kerja (e-expo tenaga kerja). 5. Pelatihan 1000 calon tenaga kerja berkualitas 6. Kolaborasi dengan BLK (Balai Latian Kerja) dan BKK (Bursa Kerja Khusus) untuk mempersiapkan angkatan kerja lokal siap kerja. 7. Membangun tempat pelatihan dan berkumpul bagi Start-Up (Inkubator).	1. Percepatan distribusi bansos tematik untuk menjaga daya tahan ekonomi; 2. Jaminan Sosial bagi Masyarakat Kurang Mampu-miskin	1. Memberikan insentif investasi. 2. Memberikan kemudahan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal 3. Fasilitasi Pembinaan Usaha bagi UMKM dan Start-Up (1. 3P> Permodalan- Pendampingan-Pemasaran, 4. TUMPUAN (Bantuan Modal Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga) 5. Kemudahan izin usaha baru (GRATIS), 6. MOTIF (Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif) 7. Kemitraan UMKM maupun Start Up dengan Perusahaan/Industri Skala Nasional (1.Menghubungkan UMKM dan ekraf dengan perusahaan besar, 2. Program magang pelaku start up local kepada start up besar nasional.). 8. Mengadakan Pasuruan Ekraf Festival, 9. Membangun kawasan UMKM Terpadu/ Kampung Tematik, 10. Pembangunan rumah kreatif di kecamatan-kecamatan. 11. Pengembangan Industri Potensial logam, kayu, batik, banteng jelak) 12. Pengembangan Promosi dan sarana Distribusi Perdagangan 13. Membentuk BUMD/BLUD Aneka Usaha sebagai Bapak Angkat Industri (logam, kayu, batik, banteng jelak), mendorong eksternalitas dampak usaha. 14. Pengutan Pertanian Perkotaan 15. Peningkatan Produk Hasil Pengolahan hasil perikanan	1. Intensifikasi retribusi dan pajak berbasis IT untuk mengurangi kebocoran, 2. Relaksasi pajak daerah; 3. Peningakatan Pajak, PAD, dan Retribusi. 4. KEMBANG GIRI (Pengembangan Wisata Religi dan Bahari) 5. Pembangunan dan Revitalisasi tata kota (Kawasan Pelabuhan, alun-alun, Kota Tua, dan Kawasan Religi) => Smart living (kota yang nyaman). 6. Pengembangan roadmap pariwisata dan ekonomi kreatif (branding dan strategi promosi) yang melibatkan stakeholders strategis 7. Menggalakkan Event Budaya dan Pariwisata lokal.
PROGRAM NOMENKLATUR	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm). 5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 6. Program Pengembangan Umkm 7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 9. Program Perekonomian Dan Pembangunan 10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 11. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3. Program Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Kebudayaan
URUSAN	1. Urusan Pemuda dan Olahraga 2. Urusan Ketenagakerjaan	1. Urusan Sosial	1. Urusan Penanaman Modal 2. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro 3. Urusan Pariwisata (Ekraft) 4. Urusan Perindustrian 5. Urusan Perdagangan 6. Urusan Penunjang Pemerintahan (Sekretariat Daerah) 7. Urusan Pertanian 8. Urusan Perikanan	1. Urusan Keuangan Daerah 2. Urusan Pariwisata 3. Urusan Kebudayaan
PERANGKAT DAERAH	1. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 2. Dinas Tenaga Kerja	1. Dinas Sosial	1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 3. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 4. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 5. Setda Bag. Administrasi Perekonomian Dan Sda 6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 7. Dinas Perikanan	1. Badan Pendapatan Daerah 2. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



MISI II

MEMBANGUN KOTA YANG INDAH DAN NYAMAN MELALUI KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL BERKELANJUTAN



2 MEMBANGUN KOTA YANG INDAH DAN NYAMAN MELALUI KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL BERKELANJUTAN

Tujuan dan Indikator Tujuan	**Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup**	
	Baseline 2019 : NA ***Target 2024: 3,75*** ***Target 2026: 3,95*** **Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)**	
Sasaran dan Indikator Sasaran	**Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Merata**	**Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup**
	INDEKS INFRASTRUKTUR	**INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP** / **INDEKS RISIKO BENCANA**
Baseline	2020 : N/A	2020 : **68,38** / 2020 : **129,28**
Target KDH	2024 : 74,35	2024 : 74,16 / 2024 : 76,63
Target RPJMD	2026 : 76,95	2026 : 77,05 / 2026 : 77,26
Urusan	1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Urusan Perhubungan 3. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4. Urusan Pertanahan	1. Urusan Lingkungan Hidup
		1. Urusan Ketentraman dan Ketertiban
PERANGKAT DAERAH	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Dinas Lingkungan Hidup
		1. Satuan Polisi Pamong Praja (Badan Penanggualangan Bencana Daerah)

SASARAN	**MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL YANG MERATA**	**MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**	
INDIKATOR SASARAN	**INDEKS INFRASTRUKTUR**	**INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**	**INDEKS RISIKO BENCANA**
PROGRAM PRIORITAS KDH	1. Kualitas infrastruktur perkotaan (jalan kota dan saluran/ drainase) dalam kondisi baik dan laik fungsi belum optimal 2. Pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW belum optimal; 3. Peningkatan jangkauan dan akses saluran air bersih ke rumah-rumah 4. Bantuan fasilitas MCK ke rumah tanpa fasilitas sanitasi 5. 1 kelurahan 1 pengelolaan air bersih terpadu 6. Revitalisasi Transportasi publik Terpadu 7. Penyediaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana umum secara tepat waktu belum optimal	1. Pengelolaan sampah secara 3R dan terpadu mulai dari dasawisma (1 dasawisma 1 sarana pengelola sampah) 2. E-garbage sebagai pengaturan dan kontrol pengelolaan sampah 3. Pengelolaan sampah modern dan professional 4. Peningkatan jumlah dan luas taman tematik sebagai ruang publik, pariwisata dan RTH 5. 1 kelurahan 1 taman tematik 6. Penurunan kualitas udara dan air	1. Pembuatan 1000 sumur resapan untuk mengurangi volume banjir
PROGRAM NOMENKLATUR	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 5. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 6. Program Kawasan Permukiman 7. Program Pengelolaan Pelayaran 8. Program Pengelolaan Penerbangan 9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 10. Program Penatagunaan Tanah 11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Program Penanggulangan Bencana
URUSAN	1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Urusan Perhubungan 3. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4. Urusan Pertanahan	Lingkungan Hidup	Ketentraman dan Ketertiban
PERANGKAT DAERAH	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Lingkungan Hidup	Satuan Polisi Pamong Praja (Badan Penanggualangan Bencana Daerah)



MISI III

MEMANTABKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL YANG HARMONIS DENGAN MODAL SOSIAL YANG TANGGUH SERTA JAMINAN AKSES PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG MERATA



3 MEMANTABKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL YANG HARMONIS DENGAN MODAL SOSIAL YANG TANGGUH SERTA JAMINAN AKSES PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG MERATA

Tujuan dan Indikator Tujuan	**MENINGKATKAN PEMERATAAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**	**MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL YANG HARMONIS**
	Baseline 2020 : 75,28 *Target 2024: 76,63* *Target 2026: 77,26* **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**	*Baseline 2020 : NA* *Target 2024: 77,13* *Target 2026: 80,06* **INDEKS KESALEHAN SOSIAL**

Sasaran dan Indikator Sasaran	**MENINGKATNYA PEMERATAAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN**		**MENINGKATNYA PEMERATAAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN**	**MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT**	**MENINGKATNYA KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN**	**MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**	**TERWUJUDNYA TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA**	**TERWUJUDNYA SOLIDARITAN SOSIAL MASYARAKAT**
	Harapan Lama Sekolah	**Rata-Rata Lama Sekolah**	**Angka Harapan Hidup**	**Pengeluaran Perkapita**	**IPG**	**INDEKS STABILITAS**	**INDEKS TOLERANSI**	**INDEKS SOLIDARITAS SOSIAL**
Baseline	2020 : 13,62	2020 : 9,12	2020 : 79	2020 : 13,281	2020 : 96,18	2020 : NA	2020 : NA	2020 : NA
Target KDH	2024 : 13,67	2024 : 9,16	2024 : 80,5	2024 : 14,711.76	2024 : 97,17	2024 : 77,75	2024 : 78	2024 : 75,65
Target RPJMD	2026 : 13,69	2026 : 9,18	2026 : 81,5	2026 : 15,190.77	2026 : 97,37	2026 : 80,25	2026 : 81,25	2026 : 78,7
Urusan	1. Pendidikan 2. Perpustakaan		1. Kesehatan & Penanganan Covid 2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	1. Perdagangan 2. Pangan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Kesbangpol 2. Ketentraman dan Ketertiban	1. Urusan Pemerintahan Umum (Sekretariat Daerah)	1. Urusan Sosial 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlimdungan Anak
PERANGKAT DAERAH	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1. Satpol PP 2. Bakesbanpol	Sekretariat Daerah	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 2. Dinas Sosial

SASARAN	MENINGKATNYA PEMERATAAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN	MENINGKATNYA PEMERATAAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN	MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT	MENINGKATNYA KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	TERWUJUDNYA TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA	TERWUJUDNYA SOLIDARITAN SOSIAL MASYARAKAT
INDIKATOR SASARAN	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS KESEHATAN	INDEKS PPP	IPG	INDEKS STABILITAS	INDEKS TOLERANSI	INDEKS SOLIDARITAS SOSIAL
PROGRAM PRIORITAS KDH	1. Paket NUTRISI: Siswa Makan Ikan 2 minggu sekali 2. Seragam Gratis kesemua Sekolah Negeri dan Swasta; 3. Beasiswa siswa berpreestasi SMA, SMK dan MA 4. Beasiswa pendidikan tinggi mahasiswa berprestasi 5. Insentif guru madarasah diniyah, TPQ dan guru ngaji hingga 400rb/bulan 6. BOSDA untuk Madin dan Pesantren 7. Peningkatan kualitas guru, pelatihan teknologi dan sertifikasi guru 8. Rehab sarana prasarana sekolah umum, diniyah dan pesantren salafiyah 9. Perbaikan sarana prasarana Pendidikan, terutama kelas, serta peningkatan kualitas infrasturktur 10. Wifi Gratis untuk Pendidikan di setiap RW 11. Belum lengkapnya koleksi buku Perpustakaan tema seni budaya dan tema lainnya	1. Aplikasi e-health untuk deteksi masalah pelayanan kesehatan dan orang sakit, dan anterian layanan Kesehatan 2. Layanan jemput bola pemeriksaan GRATIS (home care sevice) 3. Revitalisasi RSUD 4. Standarisasi Puskesmas (Akreditasi: Paripurna) agar mempunyai fasilitas menginap 5. Berobat gratis bagi keluarga kurang mampu 6. Kemudahan pelayanan pasien BPJS 7. Bantuan nutrisi bagi ibu mengandung 8. Bantuan nutrisi pemenuhan gizi bagi bayi dan balita keluarga kurang mampu 9. Revitalisasi peran Posyandu 10. Pembentukan kader kesehatan kampung 11. 1 Ambulan 1 Kelurahan 12. 1 Pesantren 1 Puskestren	1. Belum optimalnya pemenuhan pangan yang tergantung pada daerah lain 2. Naiknya harga barang terutama sembako pada saat -saat tertentu (Hari Raya) diakibatkan karena permintaan barang banyak sedangkan stok barang tidak mencukupi	1. Masih belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	1. Belum optimalnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang ketentraman dan ketertiban umum 2. Masih rendahnya kapasitas dan daya dukung dalam menjalankan fungsi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Linmas	1. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama 2. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan	1. Menjaga solidaritas antar suku dan umat beragama
PROGRAM NOMENKLATUR	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 3. Program Pembinaan Perpustakaan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Program Perlindungan Perempuan 2. Program Perlindungan Khusus Anak 3. Program Rehabilitasi Sosial
URUSAN	1. Pendidikan 2. Perpustakaan	1. Kesehatan 2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Pangan 2. Perdagangan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2. Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerintahan Umum	1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Sosial
PERANGKAT DAERAH	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1. Satpol PP 2. Bakesbanpol	Sekretariat Daerah	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 2. Dinas Sosial



MISI IV

TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK YANG MUDAH DAN CEPAT MELALUI DIGITALISASI MANAJEMEN DAN BIROKRASI YANG ADAPTIF

Manajemen Pemerintahan Adaptif dan Profesional

DIGITALISASI MANAJEMEN DAN BIROKRASI YANG ADAPTIF

Digitalisasi Pelayanan Publik

4 TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK YANG MUDAH DAN CEPAT MELALUI DIGITALISASI MANAJEMEN DAN BIROKRASI YANG ADAPTIF

Tujuan dan Indikator Tujuan

Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi

Baseline 2019 : 62,19
Target 2024: 67,56
Target 2026: 70,25

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Sasaran dan Indikator Sasaran

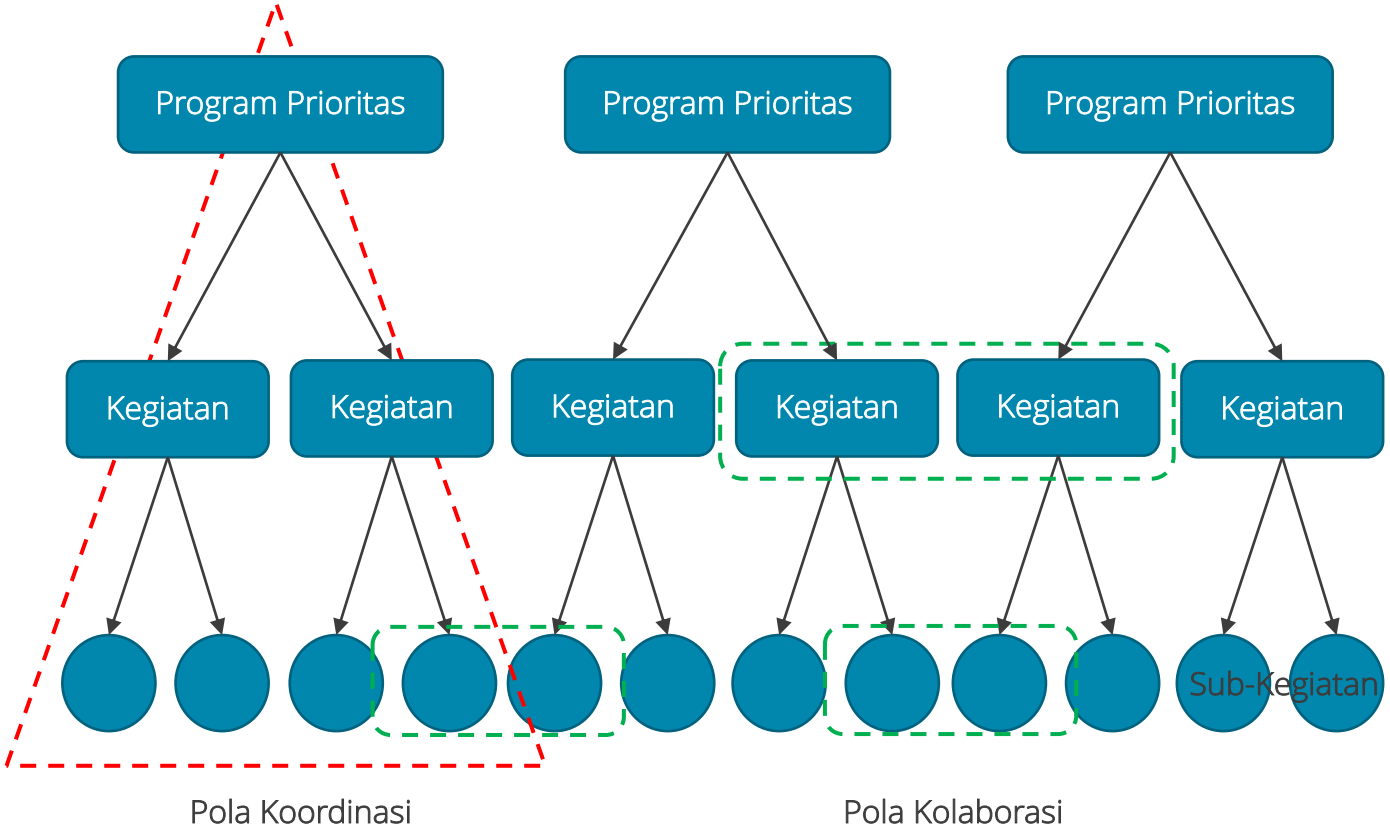
	Membangun Kapasitas Manejemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional				Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	
	Nilai SAKIP	OPINI BPK TERHADAP LKPD	LEVEL MATURITAS SPIP	INDEKS PROFESIONALISME APARATUR	INDEKS SPBE	Nilai IKM
Baseline	2020 : B	2020 : WDP	2020 : 2	2020 : 51	2020 : 2,43	2020 : 79,17
Target KDH	2024 : A	2024 : WTP	2024 : 3	2024 : 56,5	2024 : 2,95	2024 : 83,53
Target RPJMD	2026 : A	2026 : WTP	2026 : 4	2026 : 61,5	2026 : 3,25	2026 : 85,71
Urusan	1. Perencanaan 2. Kordinasi dan Kebijakan 3. Pengawasan	1. Keuangan 2. Pengawasan	1. Pengawasan	1. Kepegawaian	1. Komunikasi dan Informatika 2. Penaman Modal 3. Kordinasi dan Kebijakan 4. Kordinasi dan Kewilayahan 5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Kearsipan 7. Statistik 8. Pemberdayaan Masyarakat	
Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Sekretariatan Daerah	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Inspektorat	**Inspektorat**	**Badan Kepegawaian Daerah**	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Sekretariatan Daerah 5. Kecamatan 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7. Sekretariat DPRD	

SASARAN	MEMBANGUN KAPASITAS MANEJEMEN PEMERINTAH YANG ADAPTIF DAN PROFESIONAL				INTEGRASI DIGITALISASI PADA PELAYANAN PUBLIK	
INDIKATOR SASARAN	**NILAI SAKIP**	**OPINI BPK TERHADAP LKPD**	**LEVEL MATURITAS SPIP**	**INDEKS PROFESIONALISME APARATUR**	**INDEKS SPBE**	**NILAI IKM**
PROGRAM PRIORITAS KDH	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kota Pasuruan 68,50 berpredikat B (2019)	1. Turunnya Opni BPK WTP menjadi WDP dalam 2 tahun berturut-turut (2018-2019) 2. Nilai persepsi korupsi menurun dari 5,88	Meningkatkan Level Maturitas SPIP	Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteran Aparatur	1. Membangun SMART Gov Kualitas Pelayanan Publik 2. Layanan yang Faster, Better, Ceaper, dengan melayani sehari mesti jadi (untuk kategori perijinan ringan/umum) 3. Membangun sistem kompensasi layanan 4. Membangun respon cepat keluhan masyarakat (e-sambat), kepastian ditangani dengan SOP 5. Membangun respon cepat keluhan masyarakat (e-sambat), kepastian ditangani dengan SOP 6. Internet Gratis seluruh RW dan Infrastruktur Digital (Fiber Optik seluruh wilayah)	1. Membangun Mall Pelayanan Publik 2. Ojek Layanan 3. Anjungan Layanan Publik 24 Jam
PROGRAM NOMENKLATUR	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Kepegawaian Daerah	1. Program Aplikasi Informatika 2. Program Pelayanan Penanaman Modal 3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 4. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pendaftaran Penduduk 3. Program Aplikasi Informatika 4. Program Informasi dan Komunikasi Publik 5. Program Pengelolaan Arsip 6. Program Pelayanan Penanaman Modal 7. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
URUSAN	**1. Perencanaan** **2. Kordinasi dan Kebijakan**	**1. Keuangan**	**Pengawasan**	**Kepegawaian**	**1. Administrasi Kependudukan** **2. Komunikasi dan Informatika** **3. Penanaman Modal** **4. Statistik**	**1. Administrasi Kependudukan** **2. Kecamatan** **3. Penanaman Modal** **4. Koordinasi dan Kebijakan** **5. Kearsipan**
ANGKAT DAERAH	**1. Inspektorat** **2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** **3. Sekretariatan Daerah**	**1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** **2. Inspektorat**	**Inspektorat**	**Badan Kepegawaian Daerah**	**1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** **2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** **3. Dinas Penanaman Modal dan**	**1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** **2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** **3. Sekretariatan Daerah** **4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** **5. Kecamatan**

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dalam Landscape Pembangunan 5 Tahun





Langkah-Langkah:

1. Tetapkan siapa Koordinator penanggungjawab Program Super Prioritas;
2. Tetapkan siapa OPD leading sektor siapa OPD pendukung;
3. Rumuskan intervensi (kegiatan/pekerjaan) yang bersifat strategis dan inovatif yang diperlukan untuk mendukung Program Super Prioritas;
4. Tetapkan ukuran dan target keberhasilan;
5. Transformasikan kedalam dokumen perencanaan;
6. Tetapkan dan sepakati pola koordinasi, evaluasi dan mitigasi mengawal kegiatan tersebut;

TRANSFORMASI 10 PROGRAM PRIORITAS KEDALAM PROGRAM NOMENKLATUR

No	10 Program Politis Wali Kota	Transformasi ke Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu
1	Digitalisasi Layanan dan Pemerintahan yang Melayani	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Kemudahan Layanan 1 Pintu Sehari Mesti Jadi	Program Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil
		Program Pencatatan Sipil	
3	Pendidikan Gratis Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Kesehatan Gratis, Standarisasi Faskes, dan Percepatan Penanganan Covid 19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
5	infrastruktur dan lingkungan hidup yang ramah dan nyaman	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
6	Pembukaan Lapangan Pekerjaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
7	Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian & Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian & Perdagangan
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
8	Pengembangan Wisata Terintegrasi (Religi, Heritage, Edukasi, dan Kampung Tematik)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Bantuan Modal Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
10	Revitalisasi BUMD dalam Penguatan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

MAPPING PEMBANGUNAN KOTA PASURUAN DALAM LANDSCAPE 4 TAHUN



TEMATIK DAN PRIORITAS DAERAH KOTA PASURUAN

2022

KESEHATAN MASYARAKAT TERLINDUNGI, EKONOMI BANGKIT, DAN KONSOLIDASI KELEMBAGAAN

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonom Dampak Pandemi Covid -19
2. Pembangunan Pariwisata terintegrasi
3. Penguatan Sistem kesehatan secara preventif dan Promotif serta peningkatan Akses layanan Kesehatan
4. Penguatan penanganan Kesejahteraan Sosial Melalui Sistem Data Terpadu
5. Peningkatan Mutu Pendidikan
6. Penataan Ruang yang ramah Lingkungan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar
7. Penguatan Sistem Mitigasi Bencana
8. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
9. Peningaktan Tata Kelola pemerintahan yang Baik dengan sistem digital

2023

Pembangunan Infrastruktur Strategis Dan Pemberdayaan Potensi Lokal

1. Mengembangkan diversifikasi produk dan branding produk unggulan industri olahan;
2. Pengembangan Pariwisata terintegrasi
3. Pemenuhan sarana-prasarana hidup layak;
4. Penguatan sarana-prasaran sosial dan kesiapsiagaan bencana;
5. Penguatan keberdayaan seluruh Elemen Masyarakat dalam partisipasi pembangunan;
6. Pemenuhan dan peningkatan kualitas SPM
7. Pengembangan antar daerah dalam pengembangan pasar;
8. Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan Layanan publik yang inklusif

2024

Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar Dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sosial

1. Penyediaan pasar menunjang sektor industri pengolahan dan perdagangan
2. Perluasan promosi dan pasar industri Olahan yang siap ekspor;
3. Perluasan Promosi Pariwisata Terintegrasi
4. Pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian
5. Intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan menajemen pengelolaan pajak dan retribusi;
6. Menjaga kondusifitas sosial dan politik;
7. Digitalisasi Pelayanan publik mendukung aktivitas masyrakat;
8. Keberpihakan kesempatan Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

2025

Memantapan Kemandirian Dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Stabilitas Sosial

1. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif
2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh stakeholder
3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat ;
4. Penguatan Infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup
5. Menjaga kualitas sumber daya manusia dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
6. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah

2026

Penguatan Smart City Dan Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

1. Menguatkan kemandirian ekonomi di sektor industri olahan dan perdagangan
2. Penguatan infrastruktur layanan dasar dan kebencanaan
3. Pengembangan digitalisasi pada seluruh unsur pelayanan publik dan manajemen internal pemerintah.
4. Menjaga inflasi daerah untuk menjamin daya beli masyarakat;
5. Meningkatkan layanan pendidikan yang adaptif dan berbudaya
6. Meningkatkan layanan kesehatan yang modern

TARGET IKU DAN IKD KOTA PASURUAN

TAHUN 2021-2026

TARGET IKU KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama Kota Pasuruan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Gini Rasio	Rasio	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-4,33	5.67	5.70	5.74	5.77	5.81	5.81
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai Indeks	N/A	3,5	3,6	3,75	3,85	3,95	3,95
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	75.28	76.00	76.32	76.63	76.95	77.26	77.26
5	Indeks Kesalehan Sosial	Nilai Indeks	N/A	74,37	75,45	77,13	78,43	80,06	80,06
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai Indeks	62,19	64,88	66,22	67,56	68,9	70,25	70,25

TARGET IKD KOTA PASURUAN
TAHUN 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
A	**FOKUS PEMERATAAN EKONOMI**								
1	Gini Rasio	Rasio	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-4,33	5.67	5.7	5.74	5.77	5.81	5.81
3	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	75.28	76	76.32	76.63	76.95	77.26	77.26
4	PDRB Perkapita	Rp.ribu/org/tahun	Rp38,108.00	Rp42,730.71	Rp44,545.65	Rp46,360.60	Rp48,175.55	Rp49,990.50	Rp49,990.50
5	Rasio PAD terhadap Pendapatan	%	18%	19%	19%	20%	20%	22%	22%
6	Pengeluaran Perkapita	Rp	Rp13,281.00	Rp14,181.22	Rp14,251.57	Rp14,711.76	Rp15,071.28	Rp15,190.77	Rp15,190.77
I	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
A	**FOKUS URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**								
Pendidikan									
7	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.62	13.64	13.65	13.67	13.68	13.69	13.69
8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9.12	9.14	9.15	9.16	9.17	9.18	9.18
Kesehatan									
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	79	79,5	80	80,5	81	81,5	81,5
Sosial									
10	Angka Kemiskinan	%	6.66	5.93	5.65	5.37	5.08	4.8	4.8
Pekerjaan Umum									
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai Indeks	N/A	3,5	3,6	3,75	3,85	3,95	3,95
12	Indeks Infrastruktur	Nilai Indeks	N/A	72	73,05	74,35	75,8	76,95	76,95

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
13	Indeks Kesalehan Sosial	Nilai Indeks	N/A	74,37	75,45	77,13	78,43	80,06	80,06
14	Indeks Stabilitas	Nilai Indeks	N/A	74,5	76,05	77,75	78,90	80,25	80,25
15	Indeks Toleransi	Nilai Indeks	N/A	75,35	76,25	78	79,35	81,25	81,25
16	Indeks Solidaritas Sosial	Nilai Indeks	N/A	73,25	74,05	75,65	77,05	78,70	78,70
17	Indeks Risiko Bencana	Nilai Indeks	129,28	122,16	118,16	115,04	111,48	107,92	107,92
B	**FOKUS URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**								
Tenaga Kerja									
18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.33	4.47	4.33	4.19	4.05	3.91	3.91
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
19	Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	96.18	96.97	97.07	97.17	97.27	97.37	97.37
Lingkungan Hidup									
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks	68.38	71.27	72.72	74.16	75.61	77.05	77.05
C	**FOKUS URUSAN PENUNJANG DAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN**								
21	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai Indeks	62,19	64,88	66,22	67,56	68,9	70,25	70,25
22	Nilai SAKIP	Skor SAKIP	B	BB	BB	A	A	A	A
23	Opini BPK Terhadap LKPD	Skor Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Level Maturitas SPIP	Level	2	3	3	3	4	4	4
25	Indeks Profesionalitas Aparatur	Nilai Indeks	51	52,35	54,25	56,5	59,05	61,5	61,5
26	Indeks SPBE	Nilai Indeks	2.43	2.67	2.81	2.95	3.1	3.25	3.25
27	Nilai IKM	Nilai Indeks	79,17	81,35	82,44	83,53	84,62	85,71	85,71

Q and A

Pertanyaan yang sering muncul dalam menerjemahkan RPJMD ke Renstra PD

Pertanyaan yang sering muncul…?

Pertanyaan 1

Bagaimana jika dalam perjalanannya terdapat kondisi yang harus dilakukan namun tidak terdapat dalam RPJMD…?

……

Pertanyaan 2

Apa konsekuensinya jika yang dikerjakan atau yang disusun dalam Renstra PD tidak mengacu pada RPJMD…?

……

Pertanyaan yang sering muncul…?

Pertanyaan 3

Apakah RPJMD dapat berubah, dan apa saja syarat RPJMD dapat berubah…?

……

Pertanyaan 4

Faktor apa saja yang sering menyebabkan OPD kinerja pembangunannya tidak maksimal…?

……

Thanks...

#PasuruanKotaMadinah

